

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semenjak runtuhnya rezim orde baru pada 1998 dan angin reformasi berhembus, keran demokrasi di Indonesia terbuka lebar. Dapat dilihat dari lahirnya otonomi daerah dengan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur sendiri daerahnya dan dengan berbagai perkembangannya yang dapat dirasakan hingga kini. Selain memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur daerahnya, dampak yang paling menonjol adalah diadakannya pemilihan umum untuk kepala daerah sebagai lembaga eksekutif dan pemilihan umum untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga legislatif. Itu merupakan wujud dari kedaulatan rakyat di tingkat lokal.

Menjadi anggota eksekutif, legislatif atau yudikatif merupakan salah satu contoh keikutsertaan warga negara di dalam sistem. Seperti menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan salah satu *stakeholder* penyelenggara pemerintahan di daerah. Sebagaimana dimuat dalam UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 1 ayat 1, bahwa: “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah”.

Partisipasi warga negara juga dapat dilakukan dalam Pemilihan Umum. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan

kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹.

Pemilu merupakan wadah yang diberikan kepada warga negara untuk memilih secara langsung wakilnya untuk menjalankan roda pemerintahan untuk menduduki kursi eksekutif dan legislatif. Dalam Pemilu Indonesia saat ini, masyarakat dapat menyalurkan langsung pilihannya hanya dengan masuk ke dalam bilik suara lalu mencoblos siapa pilihannya untuk duduk di kursi legislatif dan eksekutif. Tidak lagi hanya dengan mencoblos partai.

DPRD terdiri dari DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Sehingga, DPRD juga dipilih dalam pemilihan umum. Seperti dijelaskan dalam UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 147, bahwa: “DPRD kabupaten/kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum”.

Masyarakat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilu jika telah memenuhi syarat dan ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik itu laki-laki atau pun perempuan. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pasal 19 ayat 1, mengatakan : “Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara

¹ UU No. 8 Tahun 2012 tentang: Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal 1 ayat 1.

telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih”².

Dalam momen Pemilu masyarakat tidak hanya mempunyai hak memilih, namun juga mempunyai hak untuk dipilih, sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945, untuk menjadi yang dipilih dalam pemerintahan, terbuka luas bagi seluruh masyarakat yang memenuhi syarat yang telah diatur oleh aturan yang berlaku. Dalam sebuah negara yang demokratis, termasuk di dalamnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), hak memilih dan dipilih merupakan sebuah keniscayaan. Artinya dalam kehidupan berbangsa yang demokratis, hak memilih dan dipilih harus dijamin pemenuhan akan hak tersebut.³

Pemilu merupakan arena kontestasi politik untuk berkompetisi memperoleh kekuasaan antar kandidat. Persaingan antar kandidat itu dapat dipengaruhi oleh kapabilitas masing-masing calon meskipun harus ditentukan oleh suara partai politik dalam hal pencalonan. Tetapi kompetisi yang terjadi bukan persaingan antar partai namun yang lebih menonjol yaitu figur kandidat tersebut seperti ketokohan, popularitas dan moralitas, latar belakang pendidikan dan pekerjaan. Modal ini adalah bangunan relasi dan kepercayaan (*trust*) yang dimiliki oleh pasangan calon dengan masyarakat yang memilihnya.

Pada tanggal 9 April 2014 yang lalu, Indonesia telah melaksanakan Pemilihan Umum Legislatif (Pemilu Legislatif) di seluruh provinsi/kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Pemilu Legislatif 2014 ini

² UU No. 8 Tahun 2012 tentang: Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

³ Yovaldri Riki Putra. 2012. *Optimalisasi Modal Politik Pasangan Ismet Amzis - Harma Zaldi pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Bukittinggi 2010*. Skripsi Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas.

bertujuan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pada Pemilu Legislatif 2014 tersebut, di Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, terpilih dua orang perempuan untuk mengisi kuota kursi DPRD Kota Payakumbuh periode 2014-2019. Kota Payakumbuh adalah satu-satunya kota yang memiliki seorang legislator yang sudah tiga kali menduduki kursi DPRD Kota di antara enam kota lainnya di Sumatera Barat. Inilah yang menjadikan Kota Payakumbuh menarik untuk diteliti. Antara kedua kandidat yang terpilih tersebut, terdapat perbedaan yang cukup mencolok. Salah satunya adalah pengalaman politik yang tak sebanding. Sehingga ini menarik untuk menemukan apakah terdapat kesamaan antara modal politik antara Hurisna Jamhur atau pun Wulan Denura yang merupakan wajah baru. Asumsi peneliti alasan Hurisna Jamhur terpilih kembali yaitu merupakan andil dari modal politik yang dimiliki legislator tersebut, sehingga ia terpilih kembali untuk ketiga kalinya itu merupakan bahwa ia telah memperoleh kepercayaan masyarakat dan mengkonversikannya menjadi suara dalam pemilu legislatif lalu memperoleh kursi dalam kontestasi kekuasaan tersebut. Sedangkan Wulan Denura terpilih karena suara atau posisi partai politik yang baik dalam Pemilu 2014. Tabel 1.1 di bawah ini menunjukkan jumlah keterwakilan perempuan dalam DPRD Kota di Sumatera Barat.

Tabel 1.1
Data jumlah Anggota DPRD perempuan di seluruh Kota di Provinsi Sumatera Barat

NO	KOTA	JUMLAH DPRD PEREMPUAN
1	PADANG	7
2	PARIAMAN	1
3	PADANG PANJANG	4
4	BUKITTINGGI	2
5	PAYAKUMBUH	2
6	SAWAHLUNTO	4
7	SOLOK	1

Sumber: website KPU kota provinsi Sumatera Barat

Lihat tabel 1.2 di bawah ini bagaimana perbandingan keterwakilan berapa kali *incumbent* para kandidat yang terpilih. Di antara 21 orang perempuan tersebut, hanya Hurisna Jamhur yang sudah tiga kali meraih kursi DPRD. Mempertahankan kapabilitas selama dua periode bukanlah hal yang mudah. Karena itu, peneliti ingin mengetahui modal politik dan membandingkannya dengan wajah baru yang terpilih di DPRD Kota Payakumbuh (Wulan Denura) yang hanya merupakan seorang bidan.

Tabel 1.2
Data anggota DPRD Perempuan Incumbent dan Baru seluruh Kota di Sumatera Barat

No	Nama	Kota	Status	Perolehan Suara	Masa Menjabat DPRD	Partai
1	Gustin Pramona, S.Pt	Padang	Incumbent	1.391	2 kali	Demokrat
2	Yuhida Darwis, SE	Padang	Baru	2.653	1 kali	PPP
3	Dewi Susanti	Padang	Baru	2.462	1 kali	Gerindra
4	Mailinda Rose, SE	Padang	Baru	1.807	1 kali	Nasdem
5	Elly Thrisyanti, SE, Akt	Padang	Baru	1.549	1 kali	Gerindra
6	Nila Kartika, A.Md	Padang	Baru	1.242	1 kali	Nasdem
7	Dian	Padang	Baru	1.101	1 kali	Nasdem

	Anggraini Oktavia, S.Sos., M.Si					
8	Hj. Nurnisma, SH	Solok	Incumbent	706	2 kali	Golkar
9	Fitri Nora, A.Md	Pariaman	Baru	1.142	1 kali	Gerindra
10	Wulan Maya Sari, S.Pd	Sawahlunto	Baru	781	1 kali	Nasdem
11	Eka Wahyu	Sawahlunto	Baru	765	1 kali	PKPI
12	Elfia Rita Dewi, SH	Sawahlunto	Baru	588	1 kali	Golkar
13	Ir. Neldaswenti, M.Si	Sawahlunto	Incumbent	576	2 kali	PPP
14	Hurisna Jamhur, S.Pd	Payakumbuh	Incumbent	682	3 kali	PAN
15	Wulan Denura, A.Md. Keb	Payakumbuh	Baru	262	1 kali	Gerindra
16	Hj. Lastri, A.Md. Keb	Padang Panjang	Incumbent	302	2 kali	PPP
17	Mesra	Padang Panjang	Incumbent	269	2 kali	Gerindra
18	Puji Hastuti, A.Md	Padang Panjang	Baru	267	1 kali	Demokrat
19	Gusnawati, S.Pd	Padang Panjang	Baru	254	1 kali	Demokrat
20	Ir. Hj. Aisyah	Bukittinggi	Incumbent	279	2 kali	Demokrat
21	Hj. Nursyida, A.Ma. Pd	Bukittinggi	Incumbent	421	2 kali	Demokrat

Sumber: diolah peneliti

Sama seperti periode sebelumnya (2009-2014), DPRD Kota Payakumbuh tetap diisi oleh dua orang perempuan dari total 25 anggota legislator Kota Payakumbuh. Kedua perempuan tersebut yakni Hurisna Jamhur, S.Pd dan Wulan Denura, Amd. Keb. Kedua orang perempuan tersebut mengalahkan 103 calon legislatif perempuan lain untuk memperoleh kursi dalam Pemilu Legislatif 2014. Berikut perolehan suara Hurisna Jamhur dan Wulan Denura serta anggota legislatif Kota Payakumbuh terpilih lainnya.

Tabel 1.3

Perolehan suara anggota legislatif terpilih Kota Payakumbuh dalam Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014

NO	NAMA	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	DAERAH PEMILIHAN
1	ISMET HARIUS	NASDEM	624	PAYAKUMBUH 1
2	SUPARMAN, S.PD	PKS	424	PAYAKUMBUH 1
3	ARIBUS MADRI, B.AC	PDIP	477	PAYAKUMBUH 1
4	MAHARNIS ZUL, S.PD	GOLKAR	799	PAYAKUMBUH 1
5	WULAN DENURA, A.MD KEB	GERINDRA	262	PAYAKUMBUH 1
6	RIDWAN, S.H	DEMOKRAT	649	PAYAKUMBUH 1
7	MARHIDAYANDI, A. MD	PAN	540	PAYAKUMBUH 1
8	IR. AHMAD ZIFAL	PPP	711	PAYAKUMBUH 1
9	BASRI LATIEF, S.H	HANURA	314	PAYAKUMBUH 1
10	ALEX WIJAYA, S.T	PBB	821	PAYAKUMBUH 1
11	AHMAD RIDHA, S.H	NASDEM	586	PAYAKUMBUH 2
12	HERI ISWANDI, SE. DT. RAJO MUNTIKO ALAM	PKS	1219	PAYAKUMBUH 2
13	HENDRI WANTO, S.SOS	GOLKAR	592	PAYAKUMBUH 2
14	MAWI ETEK MARIANTO	GERINDRA	824	PAYAKUMBUH 2
15	WILMAN SINGKUAN, DT. PARPATIAH, S.SOS, MM	DEMOKRAT	528	PAYAKUMBUH 2
16	CHANDRA SETIPON, A.MD	PAN	798	PAYAKUMBUH 2
17	ALHUDRI	PPP	745	PAYAKUMBUH 2
18	SYAFRIZAL	PBB	927	PAYAKUMBUH 2
19	NASRUL	PKS	1097	PAYAKUMBUH 3
20	YANUAR GAZALI, SE	PDIP	380	PAYAKUMBUH 3
21	YENDRI BODRA DT. PARMATO ALAM	GOLKAR	1320	PAYAKUMBUH 3
22	DRS. FITRIAL BACHRI	GERINDRA	560	PAYAKUMBUH 3

23	ADI SURYATAMA, ST	DEMOKRAT	640	PAYAKUMBUH 3
24	HURISNA JAMHUR, S.PD	PAN	682	PAYAKUMBUH 3
25	EDWARD DF, S.SOS	PPP	623	PAYAKUMBUH 3

Sumber: KPU Kota Payakumbuh

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa perolehan suara Wulan Denura dan Husrisna Jamhur berselisih cukup jauh. Perolehan suara Hurisna Jamhur mengalami peningkatan dari Pemilu Legislatif 2009. Pada Pemilu Legislatif 2009, Hurisna Jamhur memperoleh 491 suara untuk memperoleh kursi DPRD Kota Payakumbuh periode 2009-2014. Sedangkan Wulan Denura tidak ikut dalam Pemilu Legislatif pada tahun 2009 tersebut. Kursi yang diperoleh oleh Wulan Denura merupakan kursi ketiga yang diperoleh partai Gerindra untuk mengisi keanggotaan partai Gerindra dalam susunan Legislatif Kota Payakumbuh 2014-2019. Sedangkan kursi yang diperoleh Hurisna Jamhur merupakan kursi kedua yang diperoleh partai PAN dalam susunan Legislatif Kota Payakumbuh 2014-2019. Kursi yang mereka peroleh tersebut berdasarkan suara terbanyak di partai masing-masing.

Untuk suara per kecamatan Hurisna Jamhur dan Wulan Denura , lihat tabel 1.4 di bawah ini.

Tabel 1.4

Perolehan Suara per Kecamatan Hurisna Jamhur dan Wulan Denura

	Hurisna Jamhur		Wulan Denura	
Suara per Kecamatan	- Payakumbuh Timur	670 suara	- Payakumbuh Barat	262 suara
	- Payakumbuh Selatan	12 suara		

Sumber: KPU Kota Payakumbuh

Sedangkan tabel 1.5 di bawah ini adalah perolehan kursi DPRD Kota Payakumbuh per partai politik yang mengikuti Pemilu Legislatif 2014.

Tabel 1.5
Perolehan kursi Partai Politik pada Pemilu Legislatif Kota Payakumbuh tahun 2014

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN KURSI
1	NASDEM	2
2	PKS	3
3	PDIP	2
4	GOLKAR	3
5	GERINDRA	3
6	DEMOKRAT	3
7	PAN	3
8	PPP	3
9	HANURA	1
10	PBB	2

Sumber: KPU Kota Payakumbuh

Dari tabel 1.3 di atas dapat dilihat bahwa partai pengusung Wulan Denura dan Hurisna Jamhur sama-sama meraih 3 kursi dalam Pemilu Legislatif Kota Payakumbuh tahun 2014.

Perempuan dalam kancah perpolitikan memiliki keunikan tersendiri. Dalam sejarahnya hingga kini, Indonesia baru memiliki satu Presiden yang dijabat oleh seorang perempuan. Perempuan dalam ranah politik seringkali ditepikan. Kesenjangan gender di kehidupan publik dan politik merupakan sebuah tantangan global yang terus dihadapi oleh masyarakat dunia pada abad ke 21. Meskipun telah ada berbagai konvensi, kovenan dan komitmen internasional, namun secara rata-rata jumlah perempuan di dalam parlemen di dunia ini hanya 18,4 persen. Dari 190 negara, hanya tujuh negara dimana perempuan menjadi presiden atau perdana menteri. Hadirnya perempuan

sebagai bagian dari kabinet yang ada di dunia ini atau walikota, jumlahnya tak mencapai 7 dan 8 persen.⁴

Selain itu perempuan di arena pengambilan keputusan masih terus menjadi kelompok minoritas yang terpinggirkan. Perempuan yang terpilih duduk dalam lembaga perwakilan rakyat, tidak memiliki otonomi dan menjadi kepanjangan tangan dari kepentingan politik maskulin. Sebagian besar dari mereka tidak bisa menjadi agen perubahan tapi justru ikut arus dari irama politik yang berkembang di legislatif.⁵

Modalitas dalam kontestasi politik selain peran figur/modalitas kandidat, juga sangat ditentukan oleh peran dukungan politik dan ekonomi, aktor-aktor sosial politik dan ekonomi. Dalam kontestasi pemilu, dana politik juga pasti sangat menentukan strategi pemenangan yang dijalankan oleh kandidat dan tim. Modalitas ekonomi sangat diperlukan untuk membiayai semua tahap-tahap pemilu oleh kandidat dan tim pemenangan. Selain itu juga peran modal politik menunjukkan bahwa dari fungsi partai juga tidak terlepas sebagai pintu masuk bagi calon terutama bukan kader partai dan sementara itu partai-partai yang ada boleh jadi telah gagal menemukan figur-figur yang dianggap mampu bersaing terutama berkaitan dengan dukungan politik dan dana politik.⁶

Modal politik harus dimiliki oleh calon kandidat sebelum mengikuti sebuah kontestasi untuk meraih kekuasaan. Karena tanpa adanya modal

⁴ United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia. 2010. *Partisipasi Perempuan dalam Politik dan Pemerintah*. Jakarta: UNDP Indonesia.

⁵ Sri Budi Eko Wardani, dkk. *Potret Keterpilihan Perempuan di Legislatif pada Pemilu 2009*. Depok: Puskapol Fisip UI. Hlm. 12.

⁶ Stella Maria Ignasia Pantouw. 2012. *Modalitas dalam Kontestasi Politik (Studi tentang Modalitas dalam Kemenangan Pasangan Hanny Sondakh dan Maximiliaan Lomban pada Pemilu pada di Kota Bitung Sulawesi Utara tahun 2010)*. Tesis Program Studi Magister Ilmu Politik, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang.

politik, maka calon kandidat tidak akan bisa mengikuti kontestasi untuk meraih kekuasaan. Selain itu, tanpa adanya modal politik maka strategi pemenangan calon takkan pernah ada. Karena dengan modal politik inilah nantinya strategi itu dapat dilakukan. Modal politik merupakan hal pertama dan paling mendasar yang harus dimiliki oleh seorang calon kandidat kekuasaan. Setiap calon legislatif memiliki modal politik yang berbeda-beda ataupun kesamaan dalam mencapai tujuannya untuk memperoleh kursi DPRD tersebut.

Sebagai dua orang perempuan yang memperoleh kursi dalam Pemilu Legislatif 2014 Kota Payakumbuh tersebut, menarik untuk dilihat modal politik yang mereka miliki di antara calon legislatif perempuan lain yang memiliki modal kelembagaan (*track record*, pengalaman organisasi & partai pendukung) lebih unggul. Seperti diambil calon legislatif perempuan dari lima partai politik yang memperoleh suara tertinggi.

Dapat dilihat dari data (Lihat Lampiran 1) bahwa riwayat organisasi (*track record* politik dan pemerintahan) Hurisna Jamhur dan Wulan Denura bukanlah caleg yang mendominasi (masih banyak riwayat organisasi caleg lain yang lebih bagus). Sebagai contoh, Gusnadiar - Caleg dari Partai Golkar, *track record*-nya dalam organisasi tak diragukan lagi. Ia sudah menjadi bendahara Partai Golkar Kec. Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh sejak 2003 hingga 2004. Anggota Bagian Wanita dan Kesejahteraan Masyarakat DPD Partai Golkar Kota Payakumbuh 2004-2009. Dan wakil Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah I DPD Partai Golkar Kota Payakumbuh

2009-2015. Namun, ia tidak memperoleh kursi dalam Legislatif Kota Payakumbuh untuk periode 2014-2019.

Dilihat dari perspektif budaya, kedekatan calon legislatif perempuan Kota Payakumbuh 2014 terhadap regional atau organisasi-organisasi kebudayaan tidak ada yang mendominasi. Dari 45 orang calon legislatif perempuan pada lampiran 1, hanya dua orang yang memiliki riwayat terlibat dalam organisasi Bundo Kandung. Yaitu, Martaini dari PKS yang pernah menjabat sebagai wakil ketua Bundo Kandung Nagari Koto Nan Gadang dan Aswita dari partai Gerindra yang pernah menjabat sebagai sekretaris Bundo Kandung Kenagarian Tiakar Kota Payakumbuh. Dengan pengalaman tersebut maka Martaini dan Aswita memiliki akses untuk transformasi budaya di lingkungannya dan kota Payakumbuh pada umumnya.

Dari segi pengalaman-pengalaman yang berhaluan untuk peningkatan kualitas manusia, setiap calon legislatif perempuan Kota Payakumbuh 2014 juga tidak ada yang mendominasi. Jika kita mengidentifikasi dari latar belakang pendidikan pun, tidak ada yang terlalu mendominasi antara satu dengan yang lain. Karena banyak dari calon-calon tersebut lulusan strata 1 (S1).

Karena hal di atas, di dalam penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan kepada perbandingan modal politik yang dimiliki oleh Hurisna Jamhur dan Wulan Denura yang memperoleh kursi dalam DPRD Kota Payakumbuh periode 2014-2019 pada Pemilu Legislatif 2014 karena memiliki dua objek untuk diperbandingkan. Karena dari latar belakang riwayat organisasi, perspektif budaya dan pengalaman-pengalaman peningkatan kualitas manusia,

Hurisna Jamhur dan Wulan Denura tidak melebihi caleg lain bahkan ada yang lebih baik, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti modal apakah yang dimiliki mereka sehingga terpilih. Itu juga dilatarbelakangi oleh Hurisna Jamhur satu-satunya yang pernah meraih tiga kali kursi anggota DPRD diantara 21 anggota DPRD perempuan Kota di Sumatera Barat dalam tiga Pileg yang berbeda serta berurutan. Dan, penelitian mengenai perbandingan modal politik anggota DPRD perempuan belum pernah dilakukan oleh siapapun sebelumnya. Kebanyakan peneliti lain hanya meneliti modal politik satu orang DPR/DPRD atau pasangan Kepala Daerah yang memenangkan Pemilu.

B. Rumusan Masalah

Seperti yang telah dijelaskan pada latar belakang di atas, bahwa modal politik merupakan hal yang paling mendasar dan utama yang harus dimiliki oleh seorang kandidat. Dimana modal inilah yang nantinya akan mengantarkan mereka pada kontestasi kekuasaan. Jika seorang individu yang ingin mengikuti sebuah persaingan untuk memperoleh kekuasaan tidak memiliki modal, maka dapat dipastikan individu tersebut tidak bisa mengikuti kontestasi kekuasaan yang diinginkannya.

Hurisna Jamhur dan Wulan Denura adalah dua orang perempuan yang terpilih dalam kontestasi kekuasaan untuk menduduki kursi legislatif Kota Payakumbuh periode 2014-2019. Hurisna Jamhur lahir di pada tanggal 13 Juni 1972 di Kota Payakumbuh. Ia merupakan salah seorang legislator yang tak asing lagi dalam legislatif Kota Payakumbuh. Periode 2014-2019 merupakan ketiga kalinya ia menduduki kursi legislatif Kota Payakumbuh. Sehingga

pengalaman politik dan pemerintahannya tak diragukan lagi dalam kancah perpolitikan Kota Payakumbuh.

Riwayat organisasinya pun mumpuni. Ia sudah menjadi kader PAN sejak lama. Ia pernah menjabat sebagai wakil ketua DPD PAN Kota Payakumbuh pada 2005-2010 dan bendahara DPD PAN Kota Payakumbuh pada 2010-2015. Inilah modal utama yang mengantarkan ia kembali menduduki kursi legislatif Kota Payakumbuh. Karena kinerja dan pengalamannya yang matang membuat masyarakat percaya dengan kualitasnya meskipun ia seorang perempuan. Jika bukan karena kepercayaan tersebut, maka dapat diasumsikan ia takkan menduduki kursi legislatif tersebut.

Daerah pemilihan Hurisna Jamhur adalah Daerah Pemilihan Payakumbuh 3 yaitu meliputi Kecamatan Payakumbuh Timur. Pada pemilihan umum legislatif DPRD Kota Payakumbuh tahun 2014 mempunyai jumlah pemilih sebanyak 25.653. Jumlah suara sah seluruh partai politik adalah 17.785 suara, sedangkan jumlah suara tidak sah adalah 646 suara. Sehingga jumlah suara sah dan tidak sah pada Pemilihan Umum Legislatif Kota Payakumbuh 2014 Dapil Payakumbuh 3 adalah 18.431 suara.⁷

Wulan Denura lahir di Kota Payakumbuh pada tanggal 25 September 1988. Ia merupakan wajah baru dalam legislatif Kota Payakumbuh. Kader muda Gerindra ini tidak memiliki pengalaman di politik atau pun di pemerintahan sebelum mengikuti kontestasi untuk kursi legislatif Kota Payakumbuh. Pengalaman organisasinya pun tidak melebihi pengalaman organisasi caleg lainnya (Lihat Lampiran 1). Banyak caleg lain yang memiliki

⁷ KPU Kota Payakumbuh.

pengalaman organisasi di bidang politik yang lebih mumpuni dibandingkan dengan Wulan Denura.

Wulan Denura hanyalah seorang bidan tamatan Akademi Kebidanan Widya Husada Payakumbuh pada tahun 2009 sebelum mengikuti Pemilu Legislatif Kota Payakumbuh. Sebagai seorang bidan, tidak banyak modal politik yang ia miliki untuk mengikuti Pemilu Legislatif 2014 tersebut. Dibandingkan caleg lainnya, maka kemenangan Wulan Denura meraih satu kursi kekuasaan legislatif Kota Payakumbuh merupakan hal yang berada di luar dugaan. Karena dengan tidak adanya pengalaman organisasi yang mendukung untuk ia memasuki dunia politik.

Daerah Pemilihan Wulan Denura ialah Daerah Pemilihan Payakumbuh 1 yang meliputi Kecamatan Payakumbuh Barat dan Payakumbuh Selatan. Pada Pemilihan Umum Legislatif DPRD Kota Payakumbuh tahun 2014 mempunyai jumlah pemilih sebanyak 34.928. Jumlah suara sah seluruh partai politik adalah 22.418 suara, sedangkan jumlah suara tidak sah adalah 775 suara. Sehingga jumlah suara sah dan tidak sah Pemilihan Umum Legislatif Kota Payakumbuh 2014 Dapil Payakumbuh 1 adalah 23.193 suara.⁸

Berdasarkan latar belakang dan paparan di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk mengetahui: ***Bagaimana perbandingan Modal Politik Hurisna Jamhur dan Wulan Denura dalam Memperoleh Kursi DPRD Kota Payakumbuh pada Pemilihan Umum Legislatif 2014?***

⁸ *Ibid.*

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi modal politik Hurisna Jamhur dan Wulan Denura dalam memperoleh kursi DPRD Kota Payakumbuh pada Pemilu Legislatif 2014.
2. Menjelaskan perbandingan modal politik yang dimiliki oleh Hurisna Jamhur dan Wulan Denura dalam memperoleh kursi DPRD Kota Payakumbuh pada Pemilu Legislatif 2014.

D. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat penelitian adalah :

1. Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat membantu peneliti lain dalam memahami penggunaan teori Kimberly L Casey dan juga dapat memberikan kontribusi untuk menjelaskan terkait dengan modal politik yang dimiliki kandidat legislatif dalam mengikuti kontestasi politik.
2. Dari segi akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan menambah pustaka di bidang ilmu politik, menambah dan memperluas pengetahuan serta khasanah karya-karya ilmiah, serta menjadi referensi untuk penelitian berikutnya yang relevan.
3. Dari segi sosial

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pembaca guna memperluas wawasan mengenai studi tentang perbandingan modal politik dan hasil penelitian ini dapat digunakan oleh objek terkait untuk mengevaluasi serta memprediksi modal politik apa yang harus dipersiapkan

dan dimiliki seorang bakal calon anggota legislatif dalam mengikuti kontestasi politik kedepannya.

E. Asumsi

Asumsi dari peneliti adalah sebagai berikut:

1. Adanya persamaan jenis modal politik yang dimiliki oleh anggota DPRD perempuan Kota Payakumbuh periode 2014-2019 dalam memperoleh kursi DPRD pada Pemilu Legislatif 2014.

